

Analisis Pengaruh IPM dan UMP terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Syamsidar Sinaga¹, Anita Rusianti², Lidiah Tereda Iwo³

^{1,2,,3}Universitas Cenderawasih, Indonesia

E-mail: samsidarsinaga9@gmail.com¹, anitarusianti@gmail.com², lidiahiwo@feb.uncen.ac.id³

Article History:

Received: 16 Maret 2026

Revised: 03 April 2026

Accepted: 21 April 2026

Keywords: UMP, IPM,
Produktivitas Tenaga Kerja

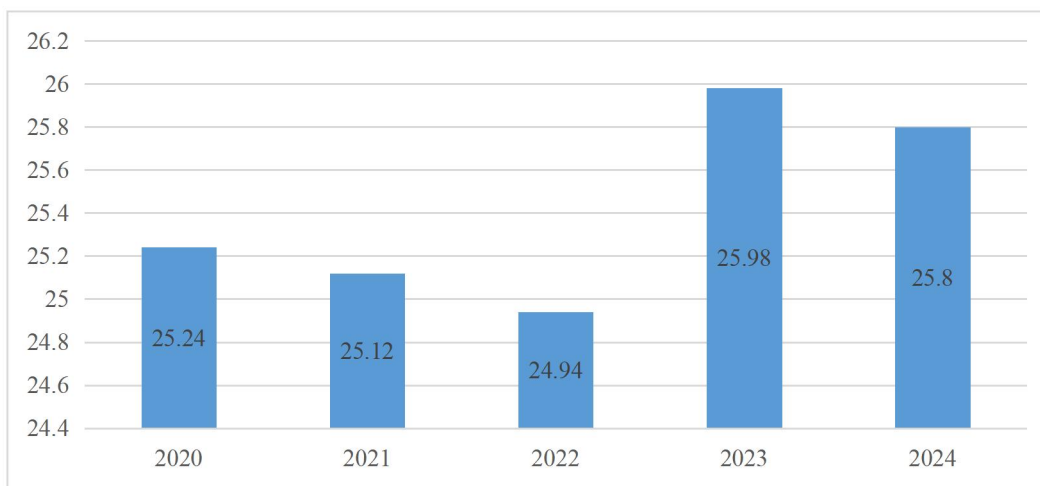
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2020–2024. Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kritis bagi percepatan ekonomi dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Saat ini, NTT masih menghadapi tantangan besar berupa tingkat produktivitas dan PDRB per kapita yang relatif rendah dibandingkan skala nasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) untuk mengolah data dari berbagai kabupaten/kota di NTT. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IPM dan UMP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dengan nilai R-Squared sebesar 90,17%. Secara parsial, IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan; peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan secara langsung meningkatkan kemampuan kognitif dan produktivitas pekerja. Demikian pula dengan UMP yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, memperkuat teori upah efisiensi bahwa imbalan yang mencukupi dapat meningkatkan motivasi dan daya upaya pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan modal manusia dan kebijakan upah yang adil merupakan kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.

PENDAHULUAN

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator krusial untuk mengukur efisiensi, daya saing ekonomi, dan performa ekonomi suatu daerah (Puspasari & Handayani, 2020). Hal ini juga menjadi parameter utama dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin kedelapan terkait pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak (United Nations, 2015).

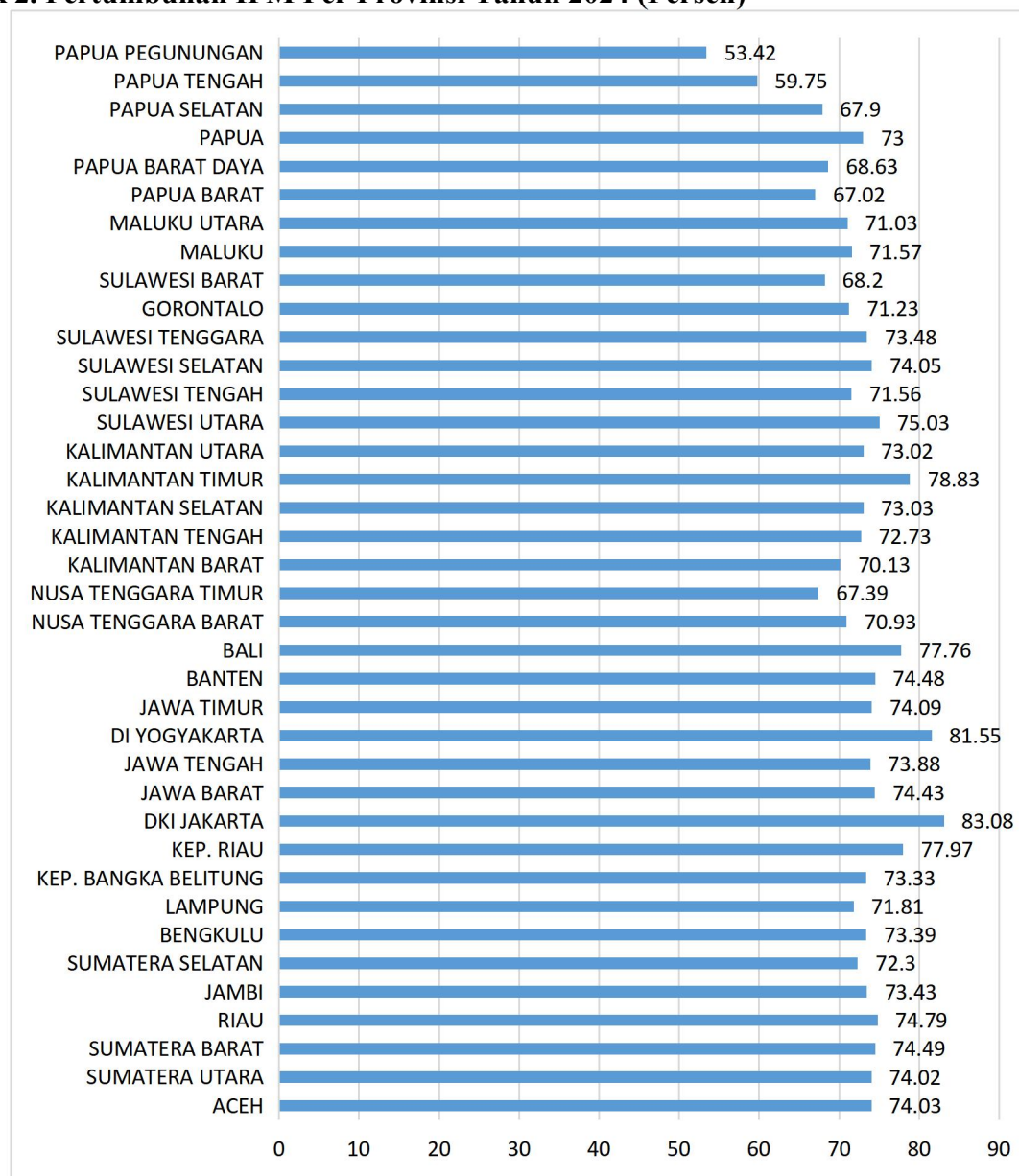
Peningkatan produktivitas sangat penting bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan agar dapat mempertahankan daya saing di tingkat global. Secara teknis, produktivitas mencerminkan jumlah output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dalam periode satu tahun tertentu. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas dan kesejahteraan ekonomi yang dicapai suatu wilayah.

Grafik 1. Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)



Sumber: Kemnaker-Produktivitas Tenaga Kerja

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Provinsi NTT periode 2020–2024 mengalami fluktuasi dengan titik tertinggi pada 2023 (25,98) dan terendah pada 2022 (24,94). Peningkatan produktivitas dipicu oleh kenaikan PDRB yang signifikan, sementara penurunan produktivitas disebabkan oleh lonjakan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di NTT menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan pekerja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator utama untuk mengukur kualitas SDM melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS, 2023). IPM mencerminkan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi tuntutan produktivitas melalui akses yang lebih baik terhadap pengetahuan dan kesehatan. Secara teori, IPM yang tinggi akan meningkatkan kemampuan kognitif, keterampilan, serta daya tahan pekerja dalam menjalankan tugasnya.

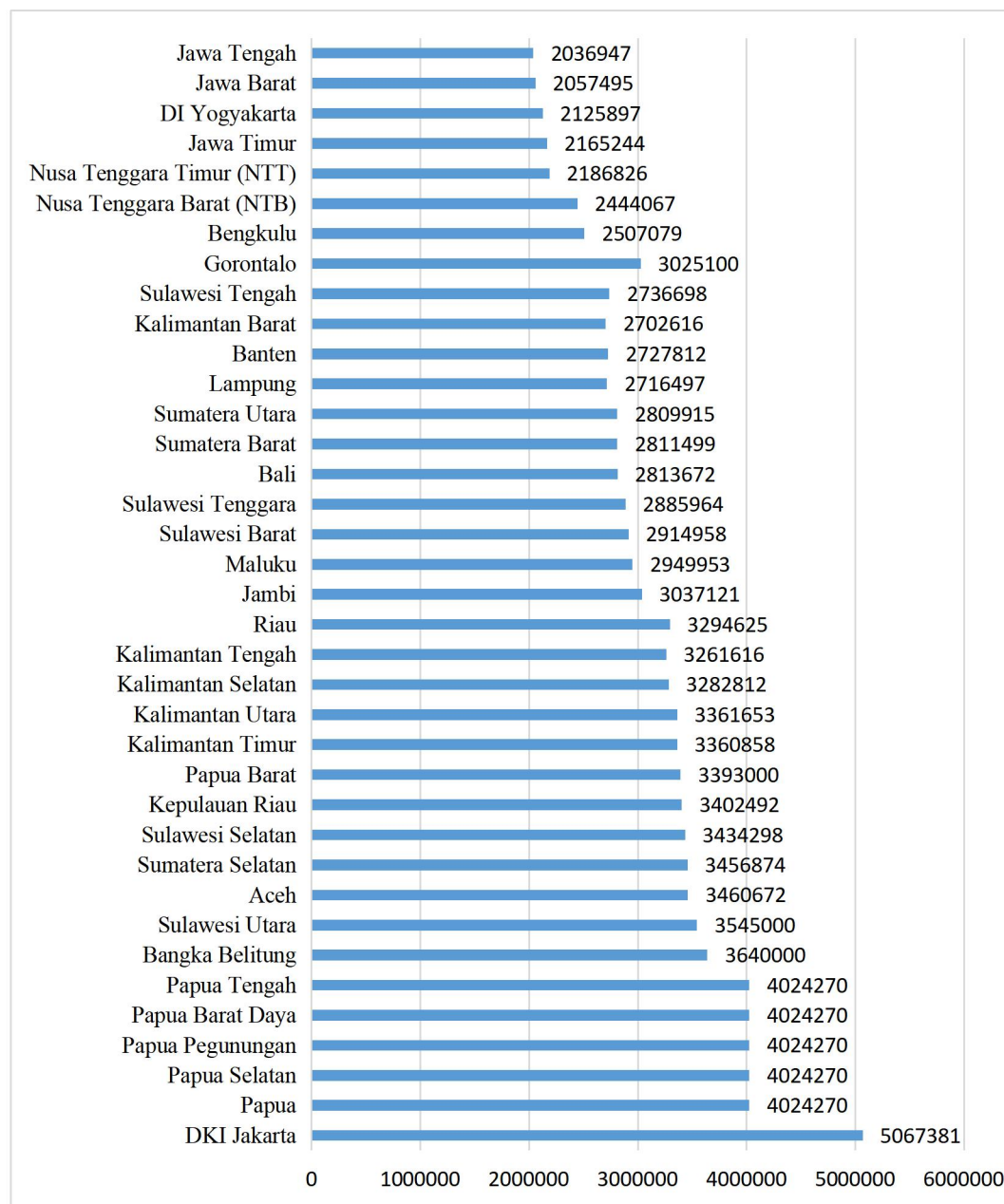
Grafik 2. Pertumbuhan IPM Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Sumber: BPS Indonesia- Pertumbuhan IPM

Berdasarkan grafik 2, IPM tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 83,08 persen terendah adalah Papua Pegunungan sebesar 53,42 persen, Papua Tengah sebesar 59,75 persen, Papua Barat sebesar 67,02 persen dan Nusa Tenggara Timur sebesar 67,39 persen. Rata-rata lama sekolah (RLS) di NTT pada tahun 2024 adalah 8 tahun, meningkat dari 7 tahun pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan, angka ini masih menunjukkan bahwa banyak penduduk belum menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Sehingga Hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia NTT. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan instrumen kebijakan penting untuk menjamin kesejahteraan sekaligus memotivasi pekerja dalam meningkatkan performa kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul mendorong produktivitas, selaras dengan Teori Upah Efisiensi yang menyatakan kualitas pekerja bergantung pada upah yang diterima. Jika upah diturunkan, pekerja produktif cenderung mencari pekerjaan lain, sedangkan

upah yang adil akan memicu motivasi untuk bekerja secara maksimal. Pemberian upah yang sebanding dengan usaha pekerja diharapkan mampu meningkatkan kualitas individu sehingga produktivitas yang dihasilkan turut meningkat. Secara teknis, produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dalam periode satu tahun tertentu (Chairunnisa, 2022).

Grafik 3. Upah Minimum Provinsi (UMP) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024 (Rupiah)



Sumber: BPS Indonesia-Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan Grafik 3, DKI Jakarta dan Papua memiliki UMP tertinggi pada tahun 2024, sementara NTT termasuk dalam kategori terendah bersama beberapa provinsi di Pulau Jawa. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat bergantung pada performa ekonomi daerah

yang tercermin melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rendahnya PDRB suatu wilayah membatasi daya dukung ekonomi daerah tersebut untuk memberikan standar upah yang lebih tinggi kepada tenaga kerja. Kondisi ini terjadi di NTT, di mana PDRB per kapitanya masih tergolong salah satu yang paling rendah di Indonesia sehingga memengaruhi kebijakan upah minimumnya. Dinamika pembangunan di NTT periode 2020–2024 sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang memperburuk tantangan struktural dan ekonomi. Pandemi menyebabkan penurunan daya saing tenaga kerja serta memaksa pekerja kembali ke sektor informal dengan produktivitas rendah. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan infrastruktur antarwilayah yang membuat daerah terpencil semakin tertinggal dalam pembangunan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, telaah komprehensif mengenai hubungan antara IPM, kebijakan UMP, dan produktivitas tenaga kerja menjadi sangat krusial. Pemahaman dinamika tersebut menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan determinan krusial bagi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah, dan stabilitas ekonomi yang berkaitan dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat (Ismail, dalam Yuniasih *et al* 2013). Secara teknis, hal ini didefinisikan sebagai kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah dan waktu tertentu, yang mencerminkan tingkat efisiensi serta efektivitas kerja (Simanjuntak, 2005). Peningkatan produktivitas menunjukkan kemampuan optimal tenaga kerja dalam mengelola waktu, keterampilan, dan sumber daya untuk menghasilkan output yang lebih besar tanpa penambahan input yang proporsional. Sejalan dengan itu, Mankiw (2012) menegaskan bahwa produktivitas adalah jumlah output per tenaga kerja dalam satuan waktu yang menjadi penentu utama standar hidup suatu negara. Oleh karena itu, perbedaan kesejahteraan antarnegara sangat erat kaitannya dengan perbedaan produktivitas, di mana tenaga kerja yang lebih produktif memungkinkan pencapaian upah dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan proses memperluas pilihan bagi manusia yang harus dipahami dari sudut pandang manusianya, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi (UNDP dalam Yektiningsih, 2018). Sebagai indikator keberhasilan kualitas hidup, IPM mencerminkan pencapaian dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang memengaruhi produktivitas individu (Mahroji dalam Maulana *et al*, 2022). Secara spesifik, komponen IPM meliputi pendidikan (melek huruf dan lama sekolah), derajat kesehatan (angka harapan hidup), dan pendapatan (Azizah, 2013). Keterampilan dan kesehatan yang baik dalam IPM akan meningkatkan kualitas hidup serta menunjang produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan (Hafiz dan Haryatiningsih, 2021). Dengan demikian, semakin tinggi nilai IPM, semakin besar pengaruhnya terhadap kesiapan dan kualitas tenaga kerja dalam mencari pekerjaan

Upah Minimum Provinsi

Upah merupakan sarana bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, emosional, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa keadilan atas kerja keras mereka (Prayogo dan Hasmarini, 2022). Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha yang ditetapkan melalui perjanjian atau peraturan perundang-undangan (Daniel, 2020). Sementara itu, UMP didefinisikan sebagai upah minimum

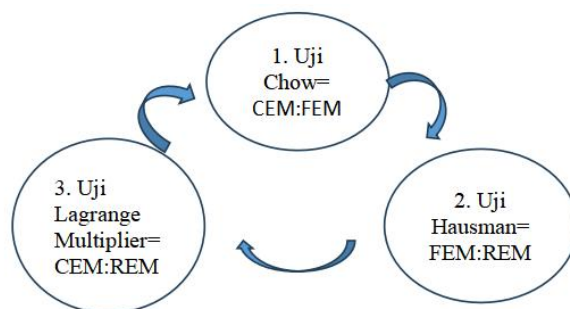
yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi yang ditetapkan oleh gubernur (Fadillah, 2020). Penetapan UMP melibatkan unsur tripartit serta pakar dan harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal 1 Januari. Upah ini berlaku selama satu tahun sebagai standar bulanan terendah bagi buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel. Data panel yang digunakan adalah gabungan data deret waktu (time series) dari tahun 2020-2024 dan data kerat silang (cross section) yang diambil dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

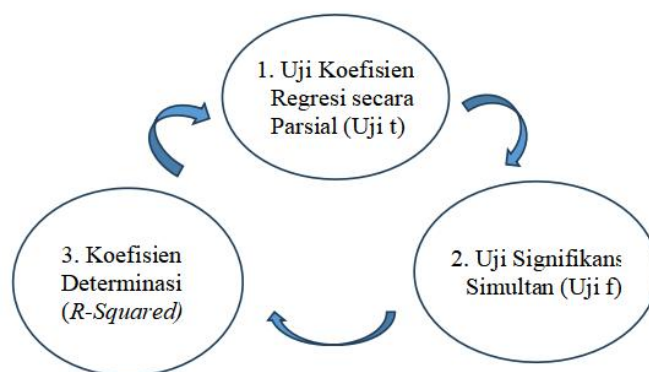
Metode Analisis Data



Gambar 1. Uji Kesesuaian Model



Gambar 2. Uji Asumsi K Klasik



Gambar 3. Uji Hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	PROD.TK	IPM	UMR
Mean	24158016	65.93945	2039951
Maximum	86927526	83.21000	2250419
Minimum	12621774	57.02000	1950000
Std. Dev.	14002249	4.513790	100363.7
Observations	110	110	110

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	22.836710	(21,86)	0.0000
Cross-section Chi-square	207.183724	21	0.0000

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil Uji Chow kedua nilai probabilitas Cross Section F dan Chi Square adalah 0,0000 yang artinya lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis H0 dan menerima H1, sehingga model data panel yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 3. Hasil Uji Huasman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	462.678254	2	0.0000

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil Uji Hausman diperoleh nilai Chi Square Statistic 104,749213 dengan nilai Chi Square df 2 sehingga nilai Chi-square statistic > Chi-square df, atau nilai probabilitas yaitu 0,0000 yang artinya lebih kecil dari Alpha 0,05 maka H0 ditolak, sehingga model data panel yang baik digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	IPM	UMR
IPM	1.000000	0.595760
UMR	0.595760	1.000000

Tabel 4 menunjukkan hasil uji multikolinearitas pada seluruh koefisien korelasi kurang dari 0,8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSRES
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/09/26 Time: 15:53
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 22
 Total panel (balanced) observations: 110

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.559201	1.155713	1.349125	0.1808
IPM	-0.112047	0.067885	-1.650534	0.1025
UMR	0.007031	0.003618	1.943100	0.0553

Tabel 5 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas seluruh variabel diperoleh nilai probabilitas > dari $\alpha = 5\%$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastis dalam model tersebut.

Tabel 6. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/09/26 Time: 15:34
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 22
 Total panel (balanced) observations: 110

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11.04216	2.736346	-4.035367	0.0001
X1	0.623767	0.160729	3.880855	0.0002
X2	0.225740	0.008567	26.35022	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.901739	Mean dependent var	14.42727
Adjusted R-squared	0.875459	S.D. dependent var	0.496946
S.E. of regression	0.175374	Akaike info criterion	-0.453561
Sum squared resid	2.645021	Schwarz criterion	0.135635
Log likelihood	48.94584	Hannan-Quinn criter.	-0.214580
F-statistic	34.31373	Durbin-Watson stat	1.905809
Prob(F-statistic)	0.000000		

Adapun hasil pengujian persamaan sebagai berikut:

$$Y = -11,04216 - 2,736346 - 4,035367X_2$$

t-sig (0,0001) (0,0002) (0,0000)

Hasil pengujian menunjukkan nilai *R-Squared* sebesar 0,9017, yang berarti variabel IPM dan UMR secara simultan mampu menjelaskan variabel produktivitas tenaga kerja sebesar 90,17%. Secara statistik, kedua variabel independen tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dengan nilai *Prob F* sebesar 0,0000 (kurang dari 0,05). Secara parsial, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Demikian pula dengan variabel Upah Minimum Regional (UMR) yang menunjukkan pengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja di lokasi

penelitian. Intinya, baik secara bersama-sama maupun individu, IPM dan UMP berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan kontribusi variabel yang sangat dominan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja secara parsial. Selain itu, pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan dalam mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan upah yang tepat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan performa tenaga kerja di NTT.

DAFTAR REFERENSI

- Azizah. 2013. Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Indeks
- Daniel, Prima Audia. 2020. Pengaruh Upah Dan Pendidikan Terhadap Produktivitas Development: the 17 Goals. <https://sdgs.un.org/goals> Empat.
- Fadillah, Aiga *et al* (2020) Analisis Determinan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Hafiz, Emil Abdhal dan Haryatiningsih, Ria. 2021. Pengaruh PDRB, UMK, IPM
- Mankiw, N. Gregory. 2012. Prinsip Ekonomi Makro, Edisi Asia. Jakarta: Salemba
- Maulana, Bagus Fakhri *et al*. 2022. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) No.1 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index Pembangunan Manusia Dan Indeks Mutu Hidup Serta Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4.
- Pendidikan, Kesehatan, Dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol.5, No.2
- Prayogo, Imam dan Hasmarini, Maulidiah Indira. 2022. Analisis Pengaruh IPM, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Volume 3
- Puspasari, Dwi Agustin. Handayani, Herniwati Retno. 2020. Analisis Pengaruh
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta : FE UI. Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis Volume 18, No. 2 E-ISSN:2614-4549. Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi. Jurnal Development, Vol.8 No.2, e-ISSN: 2615-3491. terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Volume 1, No. 1, ISSN: 2798-639X Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2019-2021. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Vol.1, No.1, e-ISSN: 2962-7621.
- United Nations. 2015. Department of Economic and Social Affairs Sustainable Upah Minimum, PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Yogyakarta Tahun 2018-2021. Journal of Management & Business, Vol 5, No 2, ISSN: 2598-8301
- Yektiningsih, Endang. 2018. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan
- Yuniasih, Aisyah Fitri. 2013. Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume 14 No.1, ISSN 1411-5212